



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 26 Februari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA PASURUAN
UNIT KERJA : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

I. DATA PRIBADI

1. Nama : GUSTAP PURWOKO
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 741112

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 2.450.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 651 m2/200 m2 di KAB / KOTA KOTA PASURUAN , WARISAN Rp. 1.200.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 128 m2/150 m2 di KAB / KOTA KOTA MALANG , WARISAN Rp. 800.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 72 m2/60 m2 di KAB / KOTA KOTA MALANG , HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 327.000.000

1. MOBIL, NISSAN X TRAIL Tahun 2014, WARISAN Rp. 160.000.000
2. MOTOR, HONDA SCOPY Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
3. MOBIL, HONDA BRIO SATYA 1.2 E CVT CKD Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000
4. MOTOR, HONDA F1C02N46LU AT Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000
5. MOTOR, HONDA HONDA BEAT Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 17.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. ---

D. SURAT BERHARGA

Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 120.400.000

F. HARTA LAINNYA

Rp. ---

Sub Total

Rp. 2.897.400.000

III. HUTANG

Rp. 43.900.000



IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

2.853.500.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.